

KATA PENGANTAR

Dalam Pengelolaan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu telah ditetapkan Program /Kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja (RENJA) tahun 2019 dan Usulan Rencana Kerja 2019 dan mewujudkan Proses Manajemen guna menjaga keseimbangan antara tujuan, sasaran, dan kegiatan dalam pelaksanaan Pengelolaan administrasi keuangan Kota Kotamobagu yang efektif, efisien dan transparan.

Di dalam Rencana Kerja (RENJA) 2019 yang telah disusun ini ada beberapa indikator untuk kurun waktu 1 (satu) tahun. Indikator kinerja tersebut adalah input, output, benefit dan impact.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu merupakan acuan dalam Pelaksanaan tugas untuk meningkatkan Pendapatan Daerah, Melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Menjalankan Penataan Aset daerah Kota Kotamobagu, Renja diharapkan menjadi pedoman dan Penanggung jawaban Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu yang menjadi bagian penting dalam mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang baik.

Disadari bahwa penyusunan RENJA ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu saran dan masukan positif lainnya diharapkan, guna penyempurnaan laporan pada tahun – tahun mendatang. Terima Kasih.

Kotamobagu, 2018
PLT. KEPALA BADAN



Hj. INONTAT MAKALALAG, SE
PEMBINA TKT. I
NIP. 19681206 199403 2 008

BAB. I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan Daerah merupakan bagian integral dan tak terpisahkan dari pembangunan Nasional yang dalam pelaksanaannya memerlukan perencanaan yang cermat dan didukung oleh dana sentra partisipasi masyarakat untuk meningkatkan pemerataan pembangunan.

Dengan terbentuknya Kota Kotamobagu berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2007 hasil Pemekaran Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai satu Daerah Otonom Maka diperlukan adanya kemampuan dalam pengelolaan Keuangan Daerah terutama menggali sumber-sumber PAD dan Pengelolaan Aset Daerah.

Penyelenggaran Pemerintah dan Pembangunan Daerah secara bertahap akan semakin banyak dilimpahkan kepada Daerah. Dengan demikian semakin meningkatnya kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah maka peran Keuangan Daerah semakin penting, karena daerah dituntut untuk lebih aktif dalam memobilisasikan sumber-sumber dananya sendiri disamping mengelolah dana yang diterima dari pemerintah pusat secara efisien.

Dengan demikian peran pemerintah Daerah semakin besar, bukan saja karena hanya meningkatkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan daerah, tetapi juga karena perlu melayani sector dunia usaha yang semakin meningkat aktifitasnya di Daerah.

Oleh karena itu pemerintah daerah dalam meningkatkan dan menggali sumber daya yang ada yaitu sumber daya alam dan sumber daya manusia, pengelolaan keuangan daerah semakin meningkat merupakan tuntutan perwujudan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang – undang RI Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Undang – undang RI nomor 18 tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah,
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah,
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Pusat dan Daerah,
5. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan kota kotamobagu,

6. Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 43 tahun 2000 tentang Sistem dan prosedur Pajak dan Retribusi Daerah,
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
8. Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas daerah Kota Kotamobagu.

C. MAKSUD DAN TUJUAN.

- **Maksud** Penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2019 adalah sebagai Dokumen perencanaan Pendapatan dari PAD, Dana Perimbangan, dan Pendapatan lain-lain yang sah dengan perencanaan pengelolaan belanja langsung ataupun belanja tidak langsung selama kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan. Dengan demikian Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) merupakan '*guideline*' dalam membuat prioritas pembangunan yang akan dibiayai APBD Kota Kotamobagu dari tahun 2019-2023.
- **Tujuan** merupakan penjabaran implementasi pernyataan misi yang merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun kedepan dan bersifat realistis dan mempunyai jangkauan kedepan. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu menetapkan tujuan sebagai berikut :
 - a. Mewujudkan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan, pelaporan keuangan, pendapatan dan aset daerah yang transparan dan Akuntabel.
 - b. Mewujudkan sarana dan prasarana pelayanan yang berkualitas.

D. VISI DAN MISI

dalam rangka mendukung Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu, mempunyai Visi sebagai berikut :

- **Visi** Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu adalah ***"Mewujudkan Sistem Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah secara Profesional, Akuntabel dan Transparan menuju Kota Kotamobagu sebagai Kota Model Jasa"*** hal itu untuk mengaktualisasikan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu Periode 2013-2018 yaitu, ***"Terwujudnya Kotamobagu sebagai Kota Model Jasa di Kawasan Bolaang Mongondow Raya Menuju Masyarakat yang Sejahtera, Berbudaya, dan Berdaya Saing"***.

- **Misi** yang dirumuskan untuk mencapai Visi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu adalah :
1. Optimalisasi Pendapatan dengan intensifikasi dan Ektensifikasi yang terukur, berkualitas dan berkeadilan;
 2. Meningkatkan kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Ketentuan yang berlaku;
 3. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Standar Pelayanan Prima

E. SISTEMATIKA PENULISAN RENJA 2019

Bab I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Landasan Hukum
- D. Visi dan Misi BPKD
- E. Sistimatika Penulisan Renja

Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

- A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu
- B. Analisis Kinerja Pelayanan DPKAD
- C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPKAD
- D. Review Terhadap Rancangan Awal DPKAD
- E. Usulan Program dan Kegiatan

Bab III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.

- A. Telaan Terhadap Kebijakan Nasional
- B. Tujuan dan Sasaran
- C. Program dan Kegiatan

Bab IV PENUTUP

- A. Metode Pelaksanaan
- B. Monitoring dan Evaluasi.
- C. Saran
- D. Kesimpulan

BAB. II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Berdasarkan hal di atas maka dengan ini kami memberikan hasil Evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPD Tahun 2018 sampai triwulan 4 (empat)

a. Realisasi Program/Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	ALOKASI BIAYA		Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
		ANGGARAN	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Urusan Wajib Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah			
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.326.059.400,-	1.103.065.446,-	83,18
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.869.000,-	4.869.000,-	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	106.909.600,-	14.526.900,-	13,59
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	52.440.000,-	52.440.000,-	100
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	72.000.000,-	72.000.000,-	100
	Penyediaan Alat Tulis kantor	60.729.800,-	60.726.890,-	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.380.000,-	16.380.000,-	100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	8.000.000,-	7.980.400,-	99,76
	Penyediaan Makanan dan Minuman	7.294.000,-	7.294.000,-	100
	Rapat- rapat koordinasi & komunikasi keluar daerah	380.877.000,-	380.098.256,-	99,80
	Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang dan Jasa	64.560.000,-	51.960.000,-	100
	Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum	552.000.000,-	422.190.000,-	76,48
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	408.087.000,-	390.065.900,-	95,63
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	18.600.000,-	18.600.000,-	100
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	195.525.000,-	184.739.500,-	94,48
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	9.962.000,-	9.962.000,-	100
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	119.000.000,-	112.324.400,-	94,39
	Pemeliharaan Rutin /berkala Perlengkapan Gedung Kantor	15.000.000,-	14.700.000,-	98,00
	Pemeliharaan Rutin, Berkala Peralatan Gedung Kantor	50.000.000,-	49.940.000,-	99,88
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	90.200.000,-	90.200.000,-	100

	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perengkapannya	34.200.000,-	34.200.000,-	100
	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	14.000.000,-	14.000.000,-	100
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari – Hari Tertentu	42.000.000,-	42.000.000,-	100
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	540.481.000,-	538.967.550,-	99,72
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	540.481.100,-	538.967.550,-	99,72
5	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	4.103.461.170,-	3.507.631.093,-	85,48
	Penyusunan Standar Satuan Harga	14.820.450,-	14.820.450,-	100
	Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah	11.865.000,-	11.865.000,-	100
	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	210.996.800,-	208.158.500,-	98,65
	Pengelolaan Kas Daerah Online dan Aplikasi Informasi Pencairan SP2D	12.276.000,-	10.470.000,-	85,29
	Pembinaan, Koordinasi, Pengelolaan dan Penatausahaan Perbendaharaan	128.745.270,-	128.673.778,-	99,94
	Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Desa	90.859.800,-	89.242.011,-	98,22
	Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	585.843.550,-	515.513.650,-	88,00
	Pengamanan Barang Milik Daerah	10.000.000,-	5.529.760,-	55,30
	Penyusunan dan Penerbitan SPD	19.420.350,-	19.420.350,-	100
	Pengelolaan dan Pelaporan Dana Transfer	212.255.000,-	206.078.836,-	97,09
	Pembinaan, Koordinasi, Pengelolaan, Penatausahaan Perbendaharaan Non Kegiatan	132.969.800,-	131.744.280,-	99,08
	Monitoring dan Evaluasi Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah	120.718.400,-	105.760.300,-	87,61
	Pengelolaan Pajak Asli Daerah	918.915.650,-	779.963.050,-	84,88
	Fasilitas Pembinaan dan Pengendalian Teknis Sistem Akuntansi SKPD	84.302.200,-	75.421.761,-	89,47
	Sensus Barang Milik Daerah	69.173.100,-	0,-	0
	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	534.734.300,-	398.527.180,-	74,54
	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	241.964.600,-	197.535.394,-	81,64
	Penyusunan Rancangan peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	200.597.300,-	190.283.541,-	94,86
	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	112.572.900,-	104.280.052,-	92,63
	Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	40.000.000,-	0,-	0
	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	350.430.700,-	314.298.200,-	89,69
6	Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media	220.500.000,-	220.500.000,-	100
	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	220.500.000,-	220.500.000,-	100
JUMLAH		6.688.788.670,-	5.850.629.989,-	87,47

b. Faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program/Kegiatan

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu

Faktor Internal :

- a. Masih perlunya kualitas dan kuantitas personil;
- b. Masih belum mencukupinya sarana dan prasarana;
- c. Masih perlunya penambahan Anggaran.
- d. Masih Perlunya penambahan personil pegawai,

Faktor Eksternal :

- a. Masih banyaknya penyimpangan Pelanggaran Peraturan Daerah;
- b. Masih kurangnya kesadaran membayar Pajak;

Untuk mencapai Target yang telah ditetapkan secara nasional itu langkah kegiatan yang perlu diambil (dan ini tentunya harus diimbangi dengan penyediaan anggaran yang cukup) adalah ;

- a. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung operasional Pelayanan kepada Publik,
- b. Penyebar luasan informasi dan sistem pelayanan kepada masyarakat,
- c. Pendidikan dan pelatihan pengelolaan keuangan,
- d. Melakukan koordinasi dengan SKPD Dinas terkait yang menyangkut pengelolaan keuangan Aset Daerah,
- e. Monitoring dan Evaluasi.

c. Implikasi yang timbul terhadap target capaian Program Renja SKPD

Menumbuhkembangkan kegiatan Pelayanan yang sudah terbangun selama ini adalah lebih banyak dalam bentuk kemitraan , peran Aparatur diharapkan lebih di tingkatkan lagi, melalui :

- a. Peningkatan pelayanan masyarakat, dalam rangka mengantisipasi dinamika akselerasi reformasi yang demikian cepat sering berbenturan dalam memandang kewajiban selaku pelayan masyarakat, juga perlu dikaji lebih mendalam guna menyikapi berbagai opini dan benturan yang terjadi dalam pelayanan yang diberikan kepada masyarakat,.
- b. Pembinaan melalui pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis bagi PNS pada bidang masing-masing.

- c. Minimnya Anggaran dan Lemahnya koordinasi upaya pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu masih belum maksimal dan memperoleh hasil yang diharapkan.

d. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk faktor-faktor penyebab tersebut

- Aspek kebutuhan personil pegawai, perlu melakukan upaya pendayagunaan aparatur, mengingat imposible apabila kekurangan personil pegawai dilakukan melalui rekrutmen kepegawaian dibandingkan dengan anggaran / belanja pegawai yang mencapai 54% peluang yang harus ditangkap melalui perubahan struktur Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu, dimana setiap bidang harus memenuhi komposisi pegawai dengan mendayagunakan personil di setiap Bidang atau diisi oleh pegawai, dengan jumlah pegawai sekarang baru berjumlah 53 orang yang telah ada dari yang dibutuhkan masih perlu penambahan atau merekrut sebanyak 20 orang yang siap dengan konsekwensinya akan menambah anggaran.
- Aspek sarana dan Prasarana, untuk mendukung kegiatan operasional dan pelayanan dibutuhkan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan pelayanan sesuai SPM, Aspek pembiayaan, jelas bahwa untuk mendukung kegiatan operasional dalam pelayanan masyarakat dibutuhkan anggaran yang memadai melalui usulan anggaran dalam program dan kegiatan.

Terdapat beberapa Faktor penghambat yang berimplikasi negatif pada tidak terlaksananya program kerja sebagaimana telah di rencanakan semula. Untuk itu akan ditempuh upaya – upaya konstruktif melalui cara – cara yang produktif dan proaktif dalam menggapai faktor-faktor penghambat tersebut sehingga senantiasa terjaga kelangsungan (*sustainability*) aktivitas kantor.

Memperhatikan dan menyadari adanya keterbatasan- keterbatasan yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu, maka diperlukan langkah-langkah strategik pemecahan masalah;

1. Re- Distribusi komposisi pegawai belum sesuai beban kerja yang ada di Tiap Bidang
2. Fasilitas SIMDA serta Fasilitas – fasilitas pendukung dalam pengelolaan Administrasi keuangan serta administrasi Perpajakan,
3. Membangun jaringan kerja antara unit kerja pengelolaan administrasi keuangan.

B. ANALISIS KINERJA PELAYANAN BPKD

Faktor keberhasilan, faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian target Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2019 yaitu ketersediaan personil pegawai yang cukup berpengalaman dalam bidang pengelolaan keuangan daerah.

Faktor penghambat, Adapun faktor penghambat dalam capaian target Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah;

- Masih kurangnya komposisi pegawai sesuai perimbangan beban kerja yang dibutuhkan di tiap Bidang
- Penyediaan Fasilitas sarana dan prasarana perkantoran
- Membangun jaringan kerja antara unit kerja pengelolaan administrasi keuangan.

C. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Untuk melaksanakan Pelayanan dan kondisi yang diharapkan maka faktor-faktor berikut ini merupakan kunci keberhasilan ;

• Budaya Kerja

Budaya Kerja merupakan faktor kunci keberhasilan, karena menyangkut sikap dan perilaku pelaksana secara umum. Budaya kerja pegawai belum seluruhnya dapat mendukung kinerja pegawai atau organisasi. Sikap dan perilaku seperti malas Apel pagi, santai, malas bekerja, tidak menghargai waktu, boros dalam penggunaan sumber daya, kurang profesional dan lain-lainnya masih di jumpai, budaya kerja yang diharapkan adalah budaya kerja yang produktif dan inovatif serta dibarengi dengan kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas dan ikhlas.

• Sarana dan Prasarana

Faktor ini juga merupakan kunci penentu bagi kelancaran pelaksanaan Tugas/ program. Jumlah yang cukup dan kualitas yang memadai akan berpengaruh besar terhadap pencapaian hasil yang berkualitas.

• Kualitas Personil

Faktor ini penting karna berkaitan dengan unsur pelaksana dalam sistem manajemen, khususnya organisasi. Ketidak mampuan pelaksanaan akan sangat menentukan kualitas pencapaian hasil. Unsur kualitas sumber daya manusia antara lain pendidikan, golongan/eselon dan profesionalisme.

- **Pelayanan Prima**

Prinsip dasar Pelayanan Prima adalah memberikan kepuasan terhadap konsumen/ masyarakat, salah satu fungsi dari unsur pelaksanaan daerah adalah memberikan pelayanan prima yang penting disamping unsur pegawai adalah sarana dan Prasarana.

D. RIVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL SKPD

Perbandingan antara Rancangan Awal RKPD dengan Hasil Analisis Kebutuhan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu terdapat pada Tabel Review terhadap Rancangan AWAL RKPD tahun 2019 (terlampir)

E. USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN 2019

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Pagu Indikatif (Rp.000)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Urusan Wajib Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah				
1	Program Pelayanan Adminisrasi Perkantoran				
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kotamobagu	Output : Jumlah dokumen bermeterai Outcomes : Cakupan layanan administrasi perkantoran Benefit : Tersediaya Materai utk kelengkapan legalitas dokumen Impact : Terpenuhinya kelengkapan legalias dokumen administrasi kantor	1.200.000,-	
	2 Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kotamobagu	Output : Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya Air dan listrik Outcomes : Cakupan layanan administrasi perkantoran Benefit : Tersedianya pembayaran telepon, Air, Listrik dan jaringan internet sesuai kebutuhan Impact : Terpenuhinya	18.000.000,-	

				pembayaran sesuai kebutuhan yang direncanakan		
	3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kotamobagu	Output : Waktu penyediaan jasa keuangan Outcomes : Cakupan layanan administrasi perkantoran Benefit : Tersedianya Honorarium pengelola keuangan Impact : Meningkatnya motivasi kerja PNS pengelola keuangan	19.800.000,-	
	4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Output : Waktu penyediaan Jasa kebersihan kantor Outcomes : Cakupan layanan administrasi perkantoran Benefit : Tersedianya honorarium Jasa kebersihan kantor Impact : Terciptanya Kebersihan dilingkungan kantor	54.000.000,-	
	5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kotamobagu	Output : Jumlah dan jenis alat tulis kantor Outcomes : Cakupan layanan adm perkantoran Benefit : Tersedianya alat tulis kantor Impact : Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor untuk menunjang kegiatan kantor	18.557.200,-	
	6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kotamobagu	Output : Jumlah dan jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan Outcomes : Cakupan layanan adm perkantoran Benefit : Tersedianya barang cetak dan fotocopy yg dibutuhkan Impact : Terpenuhinya kebutuhan cetakan dan	2.938.000,-	

				pengadaan surat-surat yg dibutuhkan		
	7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kotamobagu	Output : Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan ktr yg disediakan Outcomes : Cakupan layanan adm perkantoran Benefit : Tersedianya peralatan komponen listrik utk gedung kantor Impact : Terciptanya penerangan bangunan kantor	1.000.000,-	
	8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kotamobagu	Output : Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman Outcomes : Cakupan layanan adm perkantoran Benefit : Tersedianya makanan dan minuman utk rapat Impact : Terselenggaranya pelaksanaan rapat yang baik	10.350.000,-	
	9	Rapat- Rapat Koordinasi & Komunikasi Luar Daerah	Kotamobagu	Output : Jumlah rapat-rapat koordinasi ke luar daerah Outcomes : Cakupan layanan adm perkantoran Benefit : Tersedianya biaya perjalanan dinas ke luar daerah Impact : Terciptanya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	284.250.000,-	
	10	Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang dan Jasa	Kotamobagu	Output : Waktu penyediaan jasa pengelola barang dan jasa Outcomes : Cakupan layanan administrasi perkantoran Benefit : Tersedianya honorarium pengelola barang dan jasa	21.150.000,-	

			Impact : Meningkatnya motivasi kerja PNS pengelola barang dan jasa		
	11 Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum	Kotamobagu	Output : Waktu penyediaan jasa administrasi umum Outcomes : Cakupan layanan adm perkantoran Benefit : Tersedianya honorarium jasa administrasi umum Impact : Terpenuhinya pengelola administrasi umum	414.00.000,-	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
	1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kotamobagu	Output : Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantoryang diadakan Outcomes : Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur Benefit : Tersedianya perlengkapan gedung kantor Impact : Terciptanya kebutuhan perlengkapan kantor sebagai penunjang kinerja	0,-	
	2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kotamobagu	Output : Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yg diadakan Outcomes : Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur Benefit : Tersedianya perlengkapan gedung kantor Impact : Terciptanya kebutuhan perlengkapan kantor sebagai penunjang kinerja	0,-	
	3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Kotamobagu	Output : Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/ berkala Outcomes : Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur Benefit : Tersedianya	4.988.600,-	

				Alat- alat kebersihan dan bahan pembersih		
			Impact	: Terciptanya lingkungan kantor yang bersih		
	4	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kotamobagu	Output : Jumlah dan jenis kendaraan dinas/ operasional yg dipelihara rutin/ berkala Outcomes : Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur Benefit : Tersedianya jasa pemeliharaan dan suku cadang kendaraan dinas Impact : Terciptanya kelancaran transportasi untuk mennjang tugas kantor	42.000.000,-	
	5	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kotamobagu	Output : Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin /berkala Outcomes : Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur Benefit : Tersedianya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor Impact : Terciptanya perlengkapan gedung kantor yang terawatt dan terpelihara	10.000.000,-	
	6	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kotamobagu	Output : Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin / berkala Outcomes : Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur Benefit : Tersedianya pemeliharaan peralatan gedung kantor Impact : Terciptanya peralatan gedung kantor yang terpelihara dan terjamin	20.000.000,-	

3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				
	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kotamobagu	Output : Jumlah dan Jenis Pakaian Dinas Outcomes : Terciptanya Keceragaman Pakaian Dinas	0,-
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				
	1	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kotamobagu	Output : Jumlah laporan keuangan akhir tahun Outcomes : Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan Benefit : Peningkatan kualitas system pelaporan keuangan pemerintah daerah Impact : Terselenggaranya proses penyusunan pelaporan keuangan pada entitas akuntansi pemerintah daerah	342.478.975,-
6	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				
	1	Pembinaan dan Pengendalian Teknis Sistem Akuntansi SKPD	Kotamobagu	Output : Outcomes : Benefit : Impact :	42.840.800,-
	2	Monitoring dan Evaluasi Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah	Kotamobagu	Output : Outcomes :	56.308.900,-

			Benefit :		
			Impact :		
	3	Pembinaan, Koordinasi, Pengelolaan, Penatausahaan Perbendaharaan Non Kegiatan	Kotamobagu	Output : Outcomes : Benefit : Impact :	104.216.900,-
	4	Penyusunan dan Penerbitan SPD	Kotamobagu	Output : Outcomes : Benefit : Impact :	13.168.100,-
	5	Pengelolaan dan Pelaporan Dana Transfer	Kotamobagu	Output : Outcomes : Benefit :	192.200.000,-

			Impact :		
	6 Penyusunan Standar Satuan Harga	Kotamobagu	Output : Outcomes : Benefit : Impact :	26.320.900,-	
	7 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	Kotamobagu	Output : Jumlah Ranperda/ Perda dan penjabaran Ranperda / Perda APBD Outcomes : Adanya Laporan keuangan Ranperda / Perda dan Penjabaran Ranperda /Perda APBD Benefit : Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah yg transparan dan Akuntabel Impact : Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah	226.717.375,-	
	8 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kotamobagu	Output : Jumlah Ranperda / Perda dan Penjabaran Ranperda / Perda Perubahan APBD Outcomes : Adanya laporan keuangan Ranperda / Perda dan Penjabaran Ranperda /Perda APBD Benefit : Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah yg transparan dan Akuntabel	181.941.100,-	

			Impact	: Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah		
	9	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	Kotamobagu	Output : Jumlah Ranperda dan Ranperkada Outcomes : Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah yg transparan dan Akuntabel Benefit : Adanya dasar hukum tentang pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Impact : Terselenggaranya proses pertanggung jawaban pengelolaan keuangan daerah	130.738.800,-	
	10	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Kotamobagu	Output : Tersedianya SIMDA mulai dari penganggaran, Penatausahaan, pelaporan, disetiap SKPD Outcomes : Terlaksananya pengelolaan keuangan Daerah yang transparan dan AKuntabel Benefit : Peningkatan kualitas system pengelolaan keuangan daerah Impact : Terlaksananya proses pengelolaan keuangan daerah yang tertib	89.613.000,-	
	11	Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah	Kotamobagu	Output : Terlaksananya peningkatan Manajemen Pengelolaan barang Milik Daerah Outcomes : Terlaksananya peningkatan manajemen Aset Daerah serta Penilaian Aset Barang Milik Daerah Benefit : Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah	272.188.640,-	

			Impact :		
	12 RE-Evaluasi /Appraisal Aset/ Barang Daerah	Kotamobagu	Output : Tersedianya Dokumen data Nilai Aset per SKPD Outcomes : Terlaksananya penilaian BMD yg memadai dan Akuntabel Benefit : Adanya Dokumen Hasil Penilaian BMD Impact : Nilai Barang Milik Daerah utk kebutuhan penyusunan Neraca, Penghapusan BMD	270.880.500,-	
	13 Intensifikasi Sumber – Sumber Pendapatan Daerah	Kotamobagu	Output : Cakupan peningkatan mengenai pengelolaan PAD Outcomes : Terlaksananya pungutan pajak daerah secara optimal Benefit : Meningkatnya penerimaan PAD dari pajak daerah Impact : Terwujudnya pencapaian realisasi PAD sesuai dengan target yang telah ditetapkan	206.500.000,-	
	14 Ekstensifikasi Sumber- Sumber Pendapatan Daerah	Kotamobagu	Output : Outcomes : Benefit : Impact :	141.020.000,-	
	15 Jasa Transaksi Keuangan	Kotamobagu	Output :	149.999.500	

			Outcomes :		
			Benefit :		
			Impact :		
	16	Pengelolaan Kas Daerah Online dan Aplikasi Informasi Pencairan SP2D	Kotamobagu	Output : Terlaksananya Pelayanan Kas yang terepadu dan Cepat Outcomes : Terwujudnya Pelayanan Prima Benefit : Impact :	71.319.600,-
	17	Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Desa	Kotamobagu	Output : Outcomes : Benefit : Impact :	68.903.400,-
	18	Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan / Bea Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan	Kotamobagu	Output : Outcomes : Benefit :	83.477.000,-

			Impact :		
	19 Pengamanan Barang Milik Daerah	Kotamobagu	Output : Outcomes : Benefit : Impact :	54.925.600,-	
	20 Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	Kotamobagu	Output : Outcomes : Benefit : Impact :	228.495.450,-	
	21 Pengawasan, Penertiban dan Penyelesaian Keberatan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah	Kotamobagu	Output : Outcomes : Benefit : Impact :	23.583.650,-	
	22 Pemutakhiran Data Objek dan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan / Zona Nilai	Kotamobagu	Output :	1.052.466.200,-	

	Tanah / Nilai Jual Objek Pajak / Peta Pajak dan Daftar Biaya Komponen Bangunan		Outcome : Benefit : Impact :		
23	Kajian Perda / Perwa / SK / SOP dan Sosialisasi Perda / Perwa / SK / SOP Pajak dan Retribusi Daerah.	Kotamobagu	Output : Outcome : Benefit : Impact :	77.577.850,-	
24	Penyusunan Analisis Standar Belanja	Kotamobagu	Output : Outcome : Benefit : Impact :	0,-	
J U M L A H				5.030.116.040,-	

BAB. III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menyangkut Arah kebijakan dan Prioritas pembangunan nasional yaitu dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang baik.

Tujuan dan Sasaran Renja

Tujuan adalah merupakan implementasi penjabaran dari VISI dan MISI dan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada waktu yang akan datang. Dari misi yang telah ditetapkan maka tujuan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah;

1. Mewujudkan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan, pelaporan keuangan, pendapatan dan aset daerah yang transparan dan Akuntabel.
2. Mewujudkan sarana dan prasarana pelayanan yang berkualitas.

Sasaran

Sasaran adalah Target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Sasaran yang hendak dicapai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu adalah ;

1. Terlaksanya pembinaan disiplin aparatur pengelolaan, pendapatan, dan aset daerah.
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan, pelaporan keuangan, pendapatan dan aset daerah.
3. Tersedianya sarana dan prasarana yang berkualitas.

B. USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN 2019

Program kerja yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kota Kotamobagu tahun 2015sesuai dengan kewenangan dan uraian tugas dalam rangka pencapaian tujuan adalahterdiri atas 6 program 36 kegiatan sebagai berikut :

- 1 **Program** :
Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Kegiatan** :
 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4. Penyediaan Barang kebersihan Kantor
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor
8. Penyediaan Makanan dan Minuman
9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Penyediaan
10. Penyediaan Kebutuhan Administrasi barang dan jasa
11. Penyediaan kebutuhan Administrasi Umum

2. Program :

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan :

1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
3. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung kantor
4. Pemeliharaan Rutin/ berkala kendaraan Dinas /Operasional
5. Pemeliharaan Rutin/ berkala perlengkapan Gedung kantor
6. Pemeliharaan Rutin/ berkala peralatan Gedung Kantor

3. Program :

Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan Pakaian Dinas serta perlengkapannya

5. Program :

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (1 kegiatan)

Kegiatan :

1. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir tahun

6. Program :

Peningkatan dan pengembangan pengelolaan Keuangan Daerah (21 kegiatan)

Kegiatan :

1. Pembinaan dan Pengendalian Teknis Sistem Akuntansi SKPD
2. Monitoring dan Evaluasi Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah
3. Pembinaan, Koordinasi, Pengelolaan, Penatausahaan Perbendaharaan Non Kegiatan
4. Penyusunan dan Penerbitan SPD
5. Pengelolaan dan Pelaporan Dana Transfer
6. Penyusunan Standar Satuan Harga
7. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
8. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
9. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

10. Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah
12. Revaluasi / Appraisal Aset/Barang Daerah
13. Intensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
14. Pengelolaan Kas Daerah Online dan Aplikasi Informasi Pencairan SP2D
15. Pembinaan, Koordinasi, Pengelolaan dan Penatausahaan Perbendaharaan
16. Penyusunan Analisis Standard Belanja
17. Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan / Bea Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan
18. Pengamanan Barang Milik Daerah
19. Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah
20. Pengawasan, Penertiban dan Penyelesaian Keberatan Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah
21. Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah
22. Jasa Transaksi Keuangan
23. Pemutakhiran data objek dan wajib pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan/zona nilai tanah/nilai jual objek pajak/peta pajak dan daftar biaya komponen bangunan
24. Kajian Perda/Perwa/SK/SOP dan Sosialisasi Perda/Perwa/SK/SOP Pajak dan Retribusi Daerah

BAB. IV

P E N U T U P

A. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan yang berhubungan dengan Tugas Pokok Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu dapat berbentuk :

- APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah,
- Menyusun rencana kerja dan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah tahun berikutnya,
- Penyusunan APBD terdiri atas Anggaran pendapatan, Anggaran belanja dan pembiayaan,
- Pendapatan daerah yang dikelola berasal dari pendapatan Asli daerah, Dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah,
- Perincian belanja daerah menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja,
- Penyusunan APBD sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah dan kemampuan pendapatan daerah,
- Penyampaian rancangan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikut sejalan dengan RKPD sebagai landasan RAPBD kepada kepala daerah untuk diajukan kepada DPRD,
- Menjadwalkan pembicaraan pendahuluan tentang pembahasan KUA tahun anggaran berikutnya untuk diajukan kepada DPRD,
- Pembahasan prioritas dan flapon anggaran sementara berdasar KUA yang disepakati DPRD untuk dijadikan acuan bagi setiap SKPD,
- Menerima Rencana Kerja (RENJA) dan anggaran seluruh SKPD untuk bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun berikutnya,
- Mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD, disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu

B. Monitoring dan Evaluasi

Berdasarkan Penetapan kinerja Tahun Anggaran 2019 sesuai tugas pokok fungsi Dinas –dinas Daerah Kota Kotamobagu maka Evaluasi perlu di lakukan.

Evaluasi ini di lakukan terhadap seluruh aspek yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu di mana dinamika kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang sangat pesat dan kompleks menyebabkan banyak terjadi hal – hal di luar perencanaan yang harus di tangani.

Namun demikian semua itu masih dalam ruang lingkup tugas-tugas dan pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu.

Sesuai program kondisi monitoring di lingkup pelayanan kepada masyarakat ada beberapa kendala / permasalahan yang di hadapi yaitu antara lain :

1. Terbatasnya Personil baik dari aspek kuantitatif maupun kualitatif.
 - Personil yang ada sampai saat ini masih sangat minim untuk kegiatan operasional pelayanan belum memadai
 - Terbatasnya pegawai yang telah mengikuti Diklat
2. Adanya pengembangan dan penyusunan kebijakan, standar, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan aset daerah
3. Sarana dan Prasarana penunjang operasional yang belum memadai
4. Terbatasnya dana/ biaya penunjang.

PEMECAHAN MASALAH.

Dalam Praktek Pelayanan kepada masyarakat semua Kendala / Permasalahan yang di hadapi pasti ada solusinya, Demikian pula dalam upaya peningkatan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu, langkah antisipasi guna mengatasi kendala tersebut antara lain :

- **Pengadaan Sarana dan Prasarana yang memadai.** Faktor kunci penentu bagi kelancaran pelaksanaan tugas/ program. Jumlah yang cukup dan kualitas yang memadai akan berpengaruh besar terhadap pencapaian hasil yang berkualitas,
- **Pelaksanaan Diklat/ pelaksanaan Teknis Personil pengelolaan keuangan.** Faktor ini penting sebagai pemecah masalah karena berkaitan dengan unsur pelaksana dalam sistem manajemen, khususnya organisasi. Ketidak mampuan pelaksanaan akan sangat menentukan kualitas pencapaian hasil. Unsur kualitas sumber daya manusia antara lain pendidikan, Golongan/Eselon dan profesionalisme. Sehingga perlu mengikuti Bimtek bagi personil pengelolaan keuangan.
- **Dukungan Dana yang memadai,** dengan adanya dukungan dana yang memadai dapat menunjang program dan kegiatan yang sudah di rencanakan.
- **Pelayanan Prima,** Prinsip dasar pelayanan prima adalah memberikan kepuasan terhadap konsumen / masyarakat, salah satu fungsi dari unsur pelaksanaan daerah adalah memberikan pelayanan prima yang penting disamping unsur pegawai adalah sarana dan prasarana.

- **Penambahan personil**, perlu adanya penambahan komposisi pegawai sesuai perimbangan beban kerja yang ada di tiap seksi untuk menunjang kinerja di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

C. Kesimpulan

Penyusunan Renja Dinas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu ini disusun guna memberikan arah agar dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat secara bertahap dapat mewujudkan visinya guna membangun tanah Totabuan dalam menopang terwujudnya Visi Misi Kota Kotamobagu.

Renja ini merupakan hal yang mutlak sebab selain merupakan panduan yang memberi arah dan menuntun Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam mewujudkan tujuan organisasi juga merupakan instrument yang akan dijadikan alat ukur tingkat keberhasilan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2019.

Dalam mengaplikasikan tugas Pelayanan yang diembanya, sebagaimana tertuang dalam Renja ini, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu akan menemui bermacam tantangan permasalahan dan kendala namun dengan berpedoman pada renja ini berbagai kendala dan masalah tersebut akan diupayakan seoptimal mungkin untuk dinimalisir sebab dibalik tantangan dan permasalahan tersebut luas harapan dan peluang yang dapat dicapai dan atau diraih.

D. Saran

Guna optimalisasi kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu sesuai pelayanan tugas yang diembanya, disarankan kepada para pengambil kebijakan/keputusan untuk meninjau dan meningkatkan kemampuan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah serta peningkatan sumber daya manusia personil dan sarana prasarana yang mampu menopang tugas operasional yang kesemuanya sangat bergantung pada pendanaan.

Kotamobagu,

2018

PLT. KEPALA BADAN



Hj. INONTAT MAKALALAG, SE
PEMBINA TKT. I
NIP. 19681206 199403 2 008